

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya kemajuan sistem informasi mempunyai dampak lebih besar pada perubahan aktivitas sehari-hari manusia. Pada pemerintahan perkembangan sistem informasi juga berpengaruh dan memberikan pengaruh positif juga terhadap sistem informasi pada organisasi, dalam hal ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi sudah menjadi keperluan bagi pemerintah atau organisasi dalam menunjukkan kerja entitas pemerintah atau organisasi tersebut. Dalam proses administrasi pemerintah, sistem informasi akuntansi telah menduduki bagian penting yaitu berfungsi mengolah data keuangan, oleh sebab itu diperlukan sistem informasi akuntansi yang baik. Sistem informasi akuntansi dalam lembaga publik bisa memberikan pengetahuan tentang kebijakan, masalah organisasi, strategi dan tujuan yang diajukan serta pemanfaatan dana publik terkait akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Seiring dengan reformasi pada keuangan negara, untuk membantu agar reformasi pada keuangan negara dapat berjalan dengan efektif maka harus dilaksanakan perubahan-perubahan di berbagai bidang. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan merupakan salah satu perubahan yang signifikan karena menghasilkan suatu informasi keuangan yang tersaji untuk berbagai pihak yang dipakai sama seperti tujuan masing-masing melalui proses akuntansi. Suatu perubahan di bagian akuntansi yang sangat diinginkan yaitu adanya Standar

Akuntansi Pemerintahan. *Good governance* dapat tercapai apabila dalam dapat melaksanakan pertanggungjawaban dan keterbukaan pengendalian keuangan pemerintah daerah dalam pencatatan laporan keuangan yang bertumpu dalam Standar Akuntansi Pemerintah sebenarnya.

Pemerintah pusat memberi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota/Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan yang ditangani oleh pemerintah pusat, meskipun belum seutuhnya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan uraian pelaksanaan menjadi kewajiban provinsi dan pusat bagi urusan yang sudah didesentralisasikan tersebut. Otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah akan lebih menyerahkan penyampaian "*public*" dan dilandaskan asas-asas penyampaian "*public*" serta mencakup partisipatif, tentatif, transparansi, akuntabilitas, keseimbangan hak, kesamaan kewajiban dan hak guna terlaksananya "*Good Governance*". Demi mendapatkan keadaan tersebut bahwa dibutuhkan peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi sehingga tersajinya informasi dan data di instansi pemerintah yang bisa dievaluasi serta difungsikan dengan aman, tepat serta cepat. Sistem Akuntansi Sektor Publik adalah termasuk satu bagiannya, dalam mengalami perkembangan berdasarkan pada sistem pemerintahan tersebut. Transformasi ini diidentifikasi oleh transformasi keputusan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada lembaga pemerintahan dapat meng-efisiensi jumlah tenaga kerja dan meningkatkan bayaran fungsional yang

dibelanjakan. Salah satu sistem akuntansi yang dipakai lembaga pemerintahan yaitu pengeluaran kas. Sistem ini menjalankan pengeluaran kas yang terjadi dengan cara efektif dalam lembaga pemerintahan. Pada lembaga pemerintahan, pelaksanaan sistem pengeluaran kas begitu signifikan karena kas merupakan aset pemerintah yang paling aktif dan lancar, sifatnya yang lancar karena kas cepat dan dapat dipindah membentuk aset lain sesuai keinginan, sehingga kas adalah selaku alat pembayaran yang dapat melingkupi tanggung jawab pemerintah. Kas merupakan aset lancar yang sangat aktif oleh sebab itu pengeluaran kas berhubungan dengan semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya. Transaksi pengeluaran kas dipengaruhi oleh pengeluaran transfer, pengeluaran pembiayaan, belanja daerah, dan pengeluaran nonanggaran/lainnya.

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu bagian Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang memerlukan sistem informasi akuntansi untuk memudahkan dalam penyusunan data sebagai penunjang operasional. Untuk memperlancar kinerja pemerintahan atau organisasi membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk dapat pengelolaan data dalam pengeluaran kas secara efisien dan efektif. Apabila pengendaliannya baik, maka dapat mempercepat kinerja organisasi. Hal ini berarti wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap setiap sistem kemudian dapat membuat dasar dalam mengambil keputusan pada pemerintahan serta terbentuknya akuntabilitas dan transparansi untuk menuju ke pemerintahan yang *“Good Governance”*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN”**

1.2 Batasan Masalah

Terkait dengan luasnya lingkup permasalahan penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dan terarah, penelitian ini hanya membahas tentang sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas PGRI Palembang.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan bahan acuan dan informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan untuk mahasiswa dimasa yang akan datang.

b. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas.